

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Bank Indonesia (2013) inklusi keuangan dimulai sejak terjadinya krisis keuangan pada tahun 2008 dan terus berkembang sampai saat ini. Dimana masyarakat kelompok bawah (*in the bottom of the pyramid*) yang jumlahnya cukup besar menjadi yang paling terdampak dari krisis tersebut. Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Industri Jasa Keuangan dan lembaga-lembaga terkait memiliki tanggung jawab untuk mendukung meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan. Inklusi keuangan ini dimaksudkan agar masyarakat kelompok bawah dapat diberdayakan dalam aktivitas kehidupan ekonomi dengan memberikan akses keuangan seluas-luasnya. Hingga pada tahun 2013 Presiden melalui Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) guna meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan tercapainya inklusi keuangan yang merata.

Menurut SNLKI (2017:78), inklusi keuangan adalah “ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

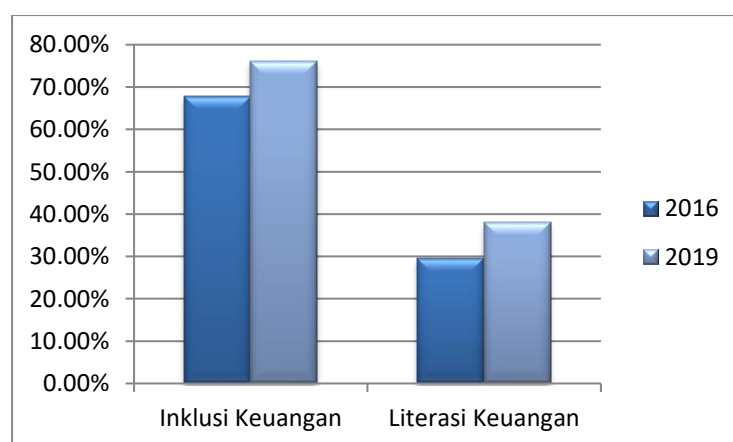
Menurut Sarma dalam SNLKI (2017:20), mendefinisikan inklusi keuangan sebagai “proses yang memastikan kemudahan akses, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan formal oleh masyarakat sebagai anggota ekonomi”.

Dalam perkembangannya, upaya dalam meningkatkan inklusi keuangan tidak hanya sebatas pengembangan produk dan layanan jasa keuangan tetapi juga meliputi empat elemen inklusi keuangan lainnya yaitu perluasan akses keuangan, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, penggunaan produk dan layanan jasa keuangan, serta peningkatan kualitas baik kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan maupun kualitas produk dan layanan jasa keuangan itu

sendiri (SNLKI 2017:20). Dalam meningkatkan inklusi keuangan ini tidak akan lepas dari literasi keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017:82), literasi keuangan sangat berkaitan erat dengan inklusi keuangan sehingga perlu adanya keselarasan dan kesinambungan antara kegiatan literasi keuangan dengan inklusi keuangan. Dengan adanya keselarasan antara literasi keuangan dan inklusi keuangan ini diharapkan perluasan akses masyarakat ke sektor jasa keuangan dapat lebih optimal.

Menurut Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (2013:80), literasi keuangan adalah “rangkaiian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*convidence*) dan keterampilan (*skill*) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan yang lebih baik”.

Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (2017:16), mendefinisikan literasi keuangan sebagai “pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan, berikut keterampilan, motivasi, serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya tersebut dalam rangka membuat keputusan keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan (*financial well being*) individu dan masyarakat, dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi”.



Grafik 1.1 Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia
Sumber: Survei Nasional Literasi Keuangan, 2019

Dari hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2019 diatas, mencatat bahwa indeks inklusi keuangan menembus angka 76,19%, atau naik 8,39% dari sebelumnya 67,8% pada 2016. Hal ini berarti telah tercapainya target inklusi keuangan ada tahun 2019 sebesar 75% berdasarkan Peraturan presiden nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Selain inklusi keuangan, hasil survei OJK juga mencatat bahwa indeks literasi keuangan juga ikut meningkat. Menurut hasil survei, indeks literasi keuangan masyarakat secara nasional berada pada tingkat *well literate* mencapai 38,03% atau naik 8,33% dari posisi tahun 2016 yang mencapai 29,7%. Inklusi keuangan dan literasi keuangan yang meningkat tetapi dengan ketimpangan indeks yang cukup jauh mengindikasikan bahwa separuh penduduk Indonesia yang mengakses dan menggunakan layanan jasa keuangan tidak memiliki pemahaman serta pengetahuan yang baik terhadap layanan yang tersebut. Artinya jauh dari kata keselarasan dan kesinambungan seperti yang diungkapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam program Strategi Nasional Literasi Keuangan agar semakin cepat tercapainya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia maka target pencapaian yang diprioritaskan adalah pada pelajar/mahasiswa, UMKM, profesi, perempuan, karyawan, petani, nelayan, pensiunan, TKI dan calon TKI, penyandang disabilitas, dan masyarakat daerah tertinggal, terpencil dan terluar. Selain sebagai target pencapaian literasi keuangan di Indonesia UMKM juga merupakan salah satu faktor yang menunjang kesejahteraan masyarakat dan perekonomian di Indonesia. Kontribusi sektor UMKM di Indonesia terbukti sangat signifikan bagi perekonomian nasional dengan menyumbang 60% Produk Domestik Bruto dan menyerap 97% tenaga kerja nasional (SP-38/DKNS/OJK/5/2016). Pentingnya peranan sektor UMKM dalam mendukung perekonomian Indonesia tersebut maka diperlukannya untuk dilakukan penguatan UMKM. Salah satu bentuk penguatan tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan serta memperluas akses keuangan bagi UMKM. Otoritas Jasa Keuangan

melakukan berbagai program untuk meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan UMKM melalui program literasi dan inklusi keuangan untuk UMKM.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Suryanie dan Ramadhan (2017), menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan pada UMKM di Kota Pekanbaru berada pada tingkat sedang, dimana variabel yang diuji yaitu tingkat pendidikan dan pendapatan berpengaruh pada tingkat literasi keuangan namun usia dan gender tidak berpengaruh terhadap literasi keuangan UMKM. Pada penelitian yang dilakukan Widyowati dan Winarto (2017), menunjukkan hasil bahwa tingkat literasi keuangan UMKM di Kota Semarang masih rendah dimana mayoritas responden berada pada tingkat *not literate* sebesar 36%, *less literate* 28%, *sufficient literate* 27% dan hanya 9% pada tingkat *well literate*. Dari penelitian ini juga didapatkan bahwa kurangnya peran lembaga terkait dalam melakukan edukasi menjadi penyebab minimnya literasi keuangan pada UMKM di Semarang.

Dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan untuk pengembangan UMKM guna memudahkan akses dan memperluas jangkauan UMKM juga memerlukan optimalisasi pemanfaatan *financial technology* (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Menurut IOSCO dalam Napitupulu, dkk., (2017:8), *Financial technology* dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Defnisi lainnya adalah variasi model bisnis dan perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk meningkatkan industri layanan keuangan.

Sejalan dengan penelitian di atas perlu adanya peran lembaga guna meningkatkan literasi keuangan dengan memberikan akses pembiayaan dan kemudahan pembayaran. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa *fintech* yang telah berkembang diantaranya *Digital Payment, Financing and Investment, Account Aggregator, Information Feeder Site, dan Personal Finance*. Berdasarkan data perkembangan *Fintech* pada 2018 yang dipaparkan Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam Indonesia *Fintech* Forum, perkembangan penyaluran pinjaman P2P kepada individu/bisnis sebesar 40%. Adapun perkembangan terbesar

selanjutnya terdapat di jenis *fintech* pembayaran (*payments*) sebesar 34%. (Jayani,2019).

Menurut *Institute for Development of Economics and Finance* dalam Rizal, dkk., (2018:98), masih ada sekitar 60 juta pelaku UMKM. Dari jumlah tersebut ternyata baru sebanyak 11 juta pelaku UMKM yang *bankable*. Sisanya sebesar 49 juta pelaku UMKM *unbankable* dari total kebutuhan pembiayaan nasional untuk UMKM sebesar Rp 1.649 triliun. Sementara kapasitas perbankan hanya Rp 660 triliun dengan begitu terdapat gap Rp 989 triliun. Dengan besarnya kebutuhan pembiayaan di Indonesia ini merupakan peluang bagi perusahaan *fintech peer to peer landing* untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Pembiayaan menggunakan *fintech* tidak banyak diketahui oleh UMKM, karena para pelaku UMKM lebih percaya dan merasa lebih aman untuk melakukan pembiayaan kepada pihak bank atau dengan modal sendiri. UMKM lebih memahami bahwa *fintech* adalah hanya sekedar sebagai transaksi dengan menggunakan teknologi canggih atau pembayaran online saja (Sugiarty, 2017:101).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hamzah dan Suhardi (2017), menunjukkan bahwa *financial technology* berpengaruh positif signifikan terhadap inklusi keuangan di Kabupaten Kuningan. Dimana *financial technology* menjadi intermediasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelaku usaha. Kebutuhan tersebut bukan hanya modal tetapi juga membantu dalam sistem pembayaran.

Menurut Rosanna (2020), indeks literasi keuangan masyarakat Sumsel pada tahun 2019 meningkat menjadi 40,05% dari semula pada tahun 2016 sebesar 31,64%. Sementara inklusi keuangan masyarakat Sumsel pada 2019 sebesar 85,06% meningkat dari tahun 2016 sebesar 73,09%. Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya untuk mendorong inklusi keuangan di Sumsel dapat meningkat diantaranya dengan optimalisasi dan perluasan program Laku Pandai, KUR, peran BPD, pembentukan TPKAD, serta mengembangkan model pembiayaan *fintech*. UMKM sendiri merupakan 90% pelaku usaha yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai ibukota provinsi dan kota terbesar, Kota Palembang memiliki UMKM terbanyak di Sumatera Selatan

dengan jumlah sekitar 37.351 unit namun UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang sendiri hanya sekitar 4.000 unit (Djoko Suud, 2020). Pada tahun 2020 terdapat jumlah usaha kecil dan menengah di Kota Palembang yaitu sebanyak 286 unit yang sebagian besar didominasi oleh bidang usaha kuliner. Meskipun UMKM di Palembang didominasi oleh usaha mikro namun banyak usaha mikro yang tidak aktif disebabkan tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan usahanya. Tak menutup kemungkinan UMKM yang telah ada akan sulit untuk berkembang dan mengalami gagal usaha dikarenakan kurangnya pemahaman dalam pengelolaan keuangan dan sulit untuk mendapatkan akses keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, diketahui bahwa pada program Strategi Nasional Literasi Keuangan agar semakin cepat tercapainya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia salah satu target pencapaian yang diprioritaskan adalah UMKM namun dikarenakan usaha mikro di Kota Palembang masih banyak yang tidak aktif maka penulis memilih objek penelitian pada UKM serta masih minimnya penelitian mengenai pengaruh literasi keuangan dan *financial technology* terhadap inklusi keuangan pada UKM sehingga judul penelitian ini adalah “Pengaruh Literasi Keuangan dan *Financial technology* terhadap Inklusi Keuangan pada UKM di Kota Palembang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tentang, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan pada UKM di Kota Palembang?
2. Bagaimana pengaruh *financial technology* terhadap inklusi keuangan pada UKM di Kota Palembang?
3. Bagaimana pengaruh literasi keuangan dan *financial technology* terhadap inklusi keuangan pada UKM di Kota Palembang?

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini maka perlu dibuat batasan masalah sehingga penulisan menjadi lebih terarah dan tidak meluas. Adapun ruang lingkup dan batasan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Penulis hanya menganalisis pengaruh literasi keuangan dan *financial technology* terhadap inklusi keuangan pada UKM di Kota Palembang.
2. Objek penelitian yang akan diteliti adalah usaha kecil dan menengah yang ada di Kota Palembang dengan jumlah sampel 74 unit.
3. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah jumlah UKM di Kota Palembang yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang sebanyak 287 unit.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas peneliti maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan pada UKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh *financial technology* terhadap inklusi keuangan pada UKM.
3. Untuk mengetahui tingkat literasi keuangan UKM di Kota Palembang.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pembaca
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman dan pembuktian bagi pembaca mengenai literasi keuangan, *financial technology* dan inklusi keuangan.
2. Bagi perusahaan *fintech*
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada perusahaan sebagai bahan evaluasi terhadap layanan yang diberikan.

3. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan agar dapat meningkatkan edukasi dan akses keuangan pada masyarakat khususnya pada UKM.